

Panglima TNI Harap Tak Ada Prajurit yang Buta Digital

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berharap tidak ada lagi prajurit yang buta digital. Demikian disampaikan Panglima Yudo saat sambutan dalam acara *launching* dan seminar literasi digital yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (13/6).

“Ke depan saya berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara,” kata Yudo.

Yudo juga berharap, tidak ada lagi prajurit yang menyebarkan konten yang bertentangan dengan tugas TNI, sebagai pemersatu bangsa. Meski dengan perkembangan digitalisasi saat ini, Panglima berharap para prajurit tetap menjaga asas kerahasiaan.

“Seolah-olah digital ini sudah tidak ada rahasia. Pada

hal kita tahu bahwa tentara di mana pun, angkatan bersenjata di mana pun, pasti akan menganut prinsip atau asas kerahasiaan yang semuanya sebenarnya tidak harus dibuka,” kata Yudo.

“Ada birokrasi tertentu yang dibuka. Namun juga ada hal tertentu yang sifatnya rahasia dan tidak bisa dibuka di publik,” katanya.

Yudo mengatakan, di lingkungan TNI, ada yang mencoba membagikan informasi, baik negatif atau positif, lalu dianggap sebagai pahlawan.

“Di lingkungan TNI saja, di masyarakat juga, seolah-olah kalau sudah meng-share sesuatu baik negatif atau positif, seolah-olah menjadi pahlawan. Jadi siapa yang share dulu, seolah-olah pahlawan,” ucap Yudo.

Oleh karena itu, Yudo berharap prajurit bisa memilah informasi yang baik dan benar untuk kepentingan satuan. ● han

Muhammadiyah Minta 28 Juni 2023 Dijadikan Hari sebagai Libur Idul Adha

JAKARTA (IM) - PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Senin, 19 Juni 2023, sehingga Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

Ihwal penetapan tersebut maka perayaan Idul Adha tahun ini berpotensi berbeda dengan pemerintah. Pasalnya, pemerintah lewat Kemenag berpotensi menetapkan Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023, meskipun baru akan menggelar sidang isbat pada Minggu 18 Juni 2023.

Terkait potensi perbedaan jadwal Idul Adha 1444 H itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan usulan terkait libur lebaran Idul Adha 1444 H.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 29 Juni 2023 sebagai hari libur nasional dalam rangka Idul Adha. Untuk itu, Mu'ti mengusulkan agar Rabu, 28 Juni 2023 juga menjadi hari libur nasional agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan Salat Id dengan tenang dan khushuk.

“Jadi liburanya dua hari,

yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Wali Kota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Idul Adha) karena harus pergi ke kantor,” ucap Mu'ti dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Kota Surakarta Periode 2022-2027, Rabu (7/6).

Usulan Mu'ti ini mengacu pada Pasal 29 ayat 2 UUD RI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

“Barangkali ini ada, syukur bila jadi libur nasional. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dibuat khusus untuk Kota Surakarta. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang yang itu dijamin oleh konstitusi,” usulnya. ● me

PPP Yakin Bacawapres Ganjar Bakal Ditentukan “Last Minute”

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi yakin, bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo akan ditentukan last minute pendaftaran calon presiden (capres) dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Langkah tersebut sangat mungkin diambil PDI-P dan partai koalisi sebagai bagian dari strategi kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Feeling saya pengumuman pasangan capres itu mendekati akhir (pendaftaran),” ujar Awiek di Jakarta, Selasa (13/6).

Ia menilai, masing-masing koalisi nantinya akan menunggu keputusan penentuan bacawapres satu sama lain.

Hal itu dilakukan untuk menentukan strategi yang paling optimal untuk bisa mengalahkan pasangan calon (paslon) lain.

“Coba mana, katanya yang Koalisi Perubahan sudah ada cawapres, enggak juga. Ya Pak Prabowo juga belum ada. Kan semua pasti

menghitung Pak Ganjar menggandeng si A, nanti calon yang lain bagaimana bisa mengalahkan,” paparnya.

Ia mencontohkan dengan situasi terjadi pada kontesasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Toh pemilu kemarin last minute semua kan. Pak Sandi diumumkan seminggu sebelum pendaftaran, Pak Ma'ruf Amin diumumkan sehari sebelum pendaftaran,” ujarnya.

Saat ini, masing-masing bacawapres tengah sibuk mencari wakilnya. Partai politik (parpol) pendukung Ganjar masih mempertimbangkan sejumlah nama, seperti Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Erick Thohir, Tuan Guru Bajang (TGB) dan Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Anies Baswedan disebut memperimbangkan AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heryawan.

Di sisi lain, Gerindra mempertimbangkan Prabowo berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dan tengah didorong Partai Golkar agar berpasangan dengan Airlangga. ● han

PENGUMUMAN

Sesuai UUPU, dengan ini diumumkan bahwa PT. BOGA MITRA SARANA, di Jakarta Selatan akan mengalihkan 100% sahamnya kepada Pihak Ketiga. Kepada Pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Direksi PT, paling lambat 14 hari sejak tgl. pengumuman ini, di/a Gedung Energy II 2, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Lot 11A SCBD, Senayan, Jakarta Selatan.

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA MENTERI ESDM BERSAMA KOMISI VII DPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6). Dalam rapat tersebut Komisi VII DPR menyetujui penambahan pagu indikatif tahun 2024 Kementerian ESDM sebesar Rp4,29 triliun menjadi Rp11,07 triliun.

Eksaminasi Vonis Ferdy Sambo Dinilai sebagai Bentuk Intervensi

Eksaminasi terhadap sebuah perkara hanya bisa dilakukan saat perkaranya sudah inkraht. Sementara Perkara Ferdy Sambo masih proses di MA.

JAKARTA (IM) - Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Binsar Gultom menilai eksaminasi atau pembahasan ulang terhadap berbagai aspek dalam proses pengadilan terhadap perkara yang menjerat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi merupakan bentuk intervensi.

Hal ini disampaikan Binsar menanggapi adanya eksaminasi yang dilakukan

oleh delapan akademisi terhadap putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Menurut Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta ini, eksaminasi terhadap sebuah perkara hanya bisa dilakukan saat perkara tersebut sudah inkraht atau berkekuatan hukum tetap.

“Hanya putusan pengadilan

yang sudah inkraht yang bisa dilakukan eksaminasi oleh siapa pun untuk kepentingan akademis,” ujar Binsar saat dihubungi wartawan, Selasa (13/6).

Wamenkumham Binsar memastikan bahwa perkara yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Kemanan (Kadiv Propam) Polri itu masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kepala Biro Humas MA, Soebandi.

“Ini berarti perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkraht vangenijdsde*,” kata hakim yang

pernah mengadili kasus kopi maut bersianida itu.

Dosen Pascasarjana Universitas Sumatera Medan (USU) ini mengatakan, aturan eksaminasi juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mar tabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

“Jika putusan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap dilakukan eksaminasi oleh para akademisi, sekalipun itu dikatakan murni untuk kepentingan akademis berarti telah terjadi intervensi putusan pengadilan,” ujar Binsar.

“Hal ini berpotensi memengaruhi para hakim agung nanti pada saat membuat putusan kasasi maupun peninjauan kembali,” kata hakim HAM yang pernah menangani kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok tersebut melanjutkan.

Binsar juga berpandangan, pembahasan atau pengujian terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk merendahkan putusan pengadilan. Ia mengatakan, keberatan terhadap suatu putusan seharusnya diuji melalui upaya hukum yang telah disediakan oleh ketentuan Undang-Undang.

“Segala persoalan hukum menyangkut materi perkara

yang dikomentari dan dianalisis tersebut dilakukan lewat upaya hukum melalui kuasa hukum yang berkepentingan, bukan dilakukan eksaminasi di luar upaya hukum kasasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, delapan akademisi yang meng-eksaminasi putusan mati Ferdy Sambo adalah Profesor Edward Omar Sharif Hiarie, Marcus Priyo Gunarto, Amir Ilyas, Koentjoro, Chairul Huda, Mahmud Mulyadi, Rocky Marbun, dan Agustinus Pohan.

Hal yang dieksaminasi kedelapan akademisi tersebut adalah dokumen terkait perkara a quo kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Dari hasil eksaminasi, terdapat tujuh isu hukum terhadap putusan Ferdy Sambo. Salah satunya menyebut bahwa perbuatan Ferdy Sambo kurang tepat dikenakan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana tapi lebih tepat Pasal 338 atau pembunuhan biasa.

Eksaminasi juga mendiskusikan putusan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi terkait Pasal turut serta dalam pembunuhan berencana. Hasil eksaminasi menunjukkan bahwa perbuatan Putri Candrawathi itu lebih tepat sebagai membantu orang lain melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Namun, eksaminasi berpandangan tidak tepat istri eks Kadiv Propam Polri itu dinyatakan bersalah melakukan turut serta pembunuhan berencana. ● han

Cawapres Prabowo, Koalisi Gerindra-PKB Tunggu PDI-P Tunjuk Pendamping Ganjar

JAKARTA (IM) - Kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024, masih penuh teka-teki.

Selama ini nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut-sebut kandidat terkuat sebagai capresnya Prabowo. Akan tetapi, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Gerindra dan PKB hingga saat ini tak kunjung mendeklarasikan nama Cak Imin sebagai cawapres. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belakangan ini disebut telah menyodorkan sosok Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo.

Terkait sosok bakal calon wakil presiden Prabowo, KKIR melalui Cak Imin

mengaku masih menunggu langkah PDI Perjuangan (PDI-P) mengumumkan nama pendamping dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

KKIR baru akan mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo apabila PDI-P benar-benar sudah memutuskan sosok pendamping Ganjar.

“Soal timing yang tepat ya kita saling menunggu, kita menunggu PDI-P dengan siapa baru kita akan putuskan,” ujar Cak Imin dikutip, Selasa (13/6).

Lebih lanjut Cak Imin mengatakan bahwa KKIR ke depan akan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar.

“Kita terus melakukan komunikasi politik, pijakan saya tetap bersama Koalisi PKB-Gerindra, berkomunikasi dengan partai-partai lain,” kata Cak Imin.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemenangan Pemilu

Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, Cak Imin masih menjadi calon terkuat untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

“Nggih, saya rasa Gus Muhaimin adalah untuk saya calon terkuat jadi cawapresnya Pak Prabowo,” ujar Budisatrio saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Budisatrio menjelaskan bahwa Gerindra dan PKB sudah saling komitmen untuk bersama-sama dalam Pilpres 2024.

Selain itu, keputusan siapa yang akan menjadi capres-cawapres juga diputuskan oleh Prabowo dan Cak Imin selaku ketua umum masing-masing parpol.

“Kami sepenuhnya mempercayakan mereka untuk nanti memformulasikan siapa yang akan mendapatkan kepercayaan jadi capres-cawapres,” katanya. ● me

FOTO: ANTARA



SIDANG LANJUTAN MARIO DANDY

Terdakwa Mario Dandy Satriyo (kanan) berjalan menuju ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (13/6). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora.

PDI-P Ungkap Penyebar Hoaks Ganjar Teken Kontrak Politik dengan Megawati

JAKARTA (IM) - PDI Perjuangan membongkar identitas penyebar hoaks ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI-P.

Dalam kontrak politik disebut, jika Ganjar terpilih sebagai Presiden pada 2024, maka untuk mengisi pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP, bukan Ganjar.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, partainya tidak akan membiarkan fitnah ini bertebaran. PDIP pun telah melacak identitas pihak yang dianggap sebagai penyebar fitnah ini.

“Kami telah identifikasi, oknum hanya bermain di medsos lalu seolah olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana,” kata Said kepada wartawan, Selasa (13/6).

Dia juga berpandangan, mereka yang menyatakan

hal ini justru sedang membangun framing untuk mengerdilkan Ganjar.

“Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDI Perjuangan bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus. Seolah olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah,” ujarnya.

Said menegaskan, saat ini PDIP sangat solid. Kader kader PDIP bersama partai lain yang mendukung Ganjar seperti PPP, Hanura dan Parindo terus turun ke bawah bersama sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar.

“Mereka semua mendukung Ganjar Pranowo dengan tulus,” tutup Said yang juga Ketua Ganjar DPR tersebut. ● me

PENGUMUMAN
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MEKAR AGUNG ABADI tanggal 12 Juni 2023 Nomor 11, dibuat di hadapan Nyonya SUSANTI SAKUM SH, Notaris di Depok, PT MEKAR AGUNG ABADI berkedudukan di Kotamadya Bandung (“Perseroan”) telah dilikuidasi dan dibubarkan sejak tanggal 12 Juni 2023.
Apabila terdapat kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan, diminta untuk mengajukan tagihan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan, yaitu:
Ir HENDRY YUWONO
dengan alamat:
Jl. Kyai Maja Blok E Nomor 11 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Likuidator
PT MEKAR AGUNG ABADI
(dalam likuidasi)